

Manajemen Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar dari Aspek Struktur Pembiayaan

Disaster Management in Mount Lawu Slope Tourism-Area in Karanganyar Regency from the Financing Aspect

Lidya Ariyani^{1*}, Istijabatul Aliyah^{1,2}, Tendra Istanabi^{1,2}

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya (PUSPARI), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi. e-mail: lidyaariyani@gmail.com

(Diterima: 8 Mei 2023; Disetujui: 18 Juni 2023)

Abstrak

Kabupaten Karanganyar merupakan kawasan prioritas pengembangan wisata yang memiliki risiko bencana banjir dan longsor. Risiko kebencanaan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan pariwisata. Selain itu, masih banyak permasalahan terkait manajemen bencana lainnya, termasuk anggaran, khususnya terkait porsi anggaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui struktur pembiayaan program manajemen bencana kawasan wisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Kasus terkait pembiayaan yang diambil untuk penelitian ini adalah program pembiayaan pada 30 objek wisata yang terpilih dengan menggunakan teknik quota sampling pada Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, dan Kecamatan Jatiyoso. Data yang digunakan adalah data tahun 2018 hingga tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan penelitian memiliki potensi wisata yang dilengkapi oleh unsur-unsur pengembangan wisata, yaitu atraksi, amenities, aksesibilitas, dan organisasi pengelola, tetapi memiliki risiko bencana alam longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api. Kawasan wisata Kabupaten Karanganyar telah melakukan seluruh tahap manajemen bencana, yaitu pencegahan, peringatan dini, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pembiayaan manajemen bencana bersumber dari pembiayaan pemerintah dan nonpemerintah. Diketahui bahwa pembiayaan manajemen bencana linier dengan kejadian bencana yang terjadi. Sementara itu, jumlah kunjungan wisata linier terhadap kebutuhan pembiayaan manajemen bencana. Struktur pembiayaan manajemen bencana paling tinggi ada pada tahap rekonstruksi yang digunakan untuk penambahan sarana maupun pembangunan ulang objek wisata yang terdampak kejadian bencana.

Kata kunci: manajemen bencana; struktur pembiayaan; wisata

Abstract

Karanganyar Regency is a priority area for tourism development but has risk of floods and landslides. Disaster risk is one of the external factors that can hinder tourism growth. In addition, there are a number of problems related to disaster management, including budget, especially related to the portion of budget. This study was conducted to determine the financing structure of the disaster management program of slopes of Mount Lawu tourism area in Karanganyar Regency. This research applies quantitative methods with quantitative descriptive analysis techniques. The case related to financing studied in this research is financing program for 30 selected tourist attractions using quota sampling techniques in Jenawi District, Ngargoyoso District, Tawangmangu District, and Jatiyoso District. This research used data from 2018 to 2022. The results show that the research area has tourism potential equipped with elements of tourism development, namely attractions, amenities, accessibility, and management organizations but has risks of landslides, earthquakes, and volcanic eruptions. Tourism area of Karanganyar Regency has carried out all stages of disaster management, namely prevention, early warning, preparedness, mitigation, disaster emergency response, rehabilitation, and reconstruction. Disaster management financing is sourced from government and nongovernment financing. It is found that disaster management financing is linear with the occurrence of disaster events, while the number of tourist visits is linear to disaster management financing needs. The highest disaster management financing structure is for the reconstruction stage for the addition of facilities and rebuilding tourist attractions affected by disaster events.

Keywords: disaster management; financing structure; tourism

1. PENDAHULUAN

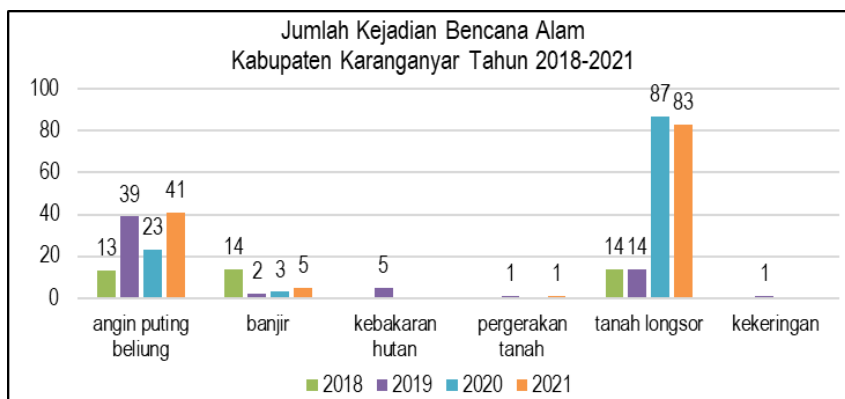
Indonesia memiliki bentang alam beraneka ragam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kebutuhan akan sosial psikologis yang dilakukan dengan pengembangan kegiatan rekreasi atau pengembangan kawasan wisata (Rosyidie, 2004). Posisi geografis Indonesia pada pertemuan empat lempeng tektonik dan sabuk vulkanik menyebabkan Indonesia memiliki resiko terhadap bencana seperti tanah longsor, banjir, gunung meletus, tsunami, serta gempa bumi. Selain itu, iklim tropis yang dimiliki negara Indonesia apabila dihubungkan pada kondisi topografi dengan permukaan dan batuan yang beraneka ragam mengakibatkan timbulnya ancaman bencana hidrometeorologi berupa tanah longsor, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Studi menunjukkan bahwa sejumlah 87% wilayah Indonesia atau lebih tepatnya 383 kabupaten/kota di seluruh Indonesia merupakan kawasan rawan bencana alam (Paidi, 2012).

Risiko kebencanaan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan pariwisata (Fadafan et al., 2018). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Cro dan Martins (2017) bahwa industri pariwisata rentan akan bencana meskipun langkah pencegahan dan penanganan bencana maupun krisis telah dilakukan. Salah satu kriteria standar kelayakan destinasi wisata adalah keamanan yang juga menyangkut keamanan wisatawan apabila terjadi bencana. Aspek kenyamanan dan keamanan sangat penting dan memiliki dampak sangat besar pada keberlangsungan pariwisata dalam dua dekade terakhir. Memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi wisatawan menjadi tantangan besar dan kompleks dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2021) mengungkapkan bahwasudah saatnya rasa aman dan jaminan keselamatan untuk wisatawan menjadi fokus pengembangan destinasi wisata di negara berkembang karena salah satu faktor pertimbangan utama para wisatawan untuk memilih tempat tujuan wisata adalah faktor keamanan. Pengembangan komponen pariwisata pada kawasan bahaya alam dapat memicu terjadinya bencana alam (Rosyidie, 2004). Semakin berkembang kegiatan pariwisata, maka risiko yang ditimbulkan akan semakin besar. Sementara itu, degradasi lingkungan di lokasi wisata pegunungan menjadi pemicu terjadinya bencana alam, seperti hilangnya flora fauna, banjir, tanah longsor, serta akibat alih fungsi lahan di lokasi tertentu (Aliyah, Sugiarti, & Yudana, 2021).

Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di lereng Gunung Lawu dengan potensi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan, yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata yang menarik dan rekreatif. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, tiga pilar yang akan ditempuh Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan wilayahnya yaitu Industri, Pertanian, dan Pariwisata (INTANPARI). Hal ini didukung Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 yang menyebutkan bahwa salah satu Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) berada di Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Cetho-Sukuh, Tawangmangu, dan sekitarnya, yang merupakan wilayah Kabupaten Karanganyar.

Meskipun Kabupaten Karanganyar memiliki beragam potensi wisata, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyatakan bahwa 14 dari 17 kecamatannya merupakan wilayah rawan bencana alam tanah longsor dan banjir, terutama saat musim penghujan (Antara, 2020). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mencatat pada tahun 2020 telah terjadi 189 kejadian bencana, yang meliputi bencana angin ribut, tanah longsor, kebakaran, rumah roboh, pergerakan tanah, dan banjir. Berikut Gambar 1. menunjukkan jenis dan jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2018-2021.



Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar dan BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 1. Grafik Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dan 2021

Potensi wisata yang terancam risiko bencana di Kabupaten Karanganyar menyebabkan manajemen bencana menjadi faktor penting dalam perencanaan pengembangan kawasan. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2020 Indonesia merupakan negara peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia yang memiliki risiko tinggi terhadap korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat dampak berbagai jenis bencana. Alokasi dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih kurang memadai dilihat dari luasnya dampak dan tingginya tingkat kerusakan yang ditimbulkan bencana beberapa waktu terakhir (Rivani, 2017). Lebih dari separuh Pemerintah Daerah di Indonesia mengalokasikan anggaran mitigasi yang lebih rendah dibandingkan standar internasional. Sementara itu, terdapat porsi anggaran yang terbatas dari Badan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana. Melihat hal tersebut, diperlukan alternatif mekanisme pembiayaan manajemen bencana guna mengatasi permasalahan dampak bencana yang terjadi.

Indonesia merupakan negara yang sangat berisiko terhadap bencana tetapi banyak masalah terkait pembiayaan manajemen bencana yang terjadi. Pembiayaan yang tepat akan mendukung suksesnya manajemen bencana termasuk didalamnya terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran yang berasal dari pemerintah maupun swadaya masyarakat (Rivani, 2017). Sejalan dengan hal ini, Adiyoso (2018) menyatakan bahwa pengelolaan bencana membutuhkan *budgeting* yang tepat untuk setiap tahapannya dan menjadi faktor utama suksesnya pelaksanaan manajemen bencana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana struktur pembiayaan manajemen bencana kawasan wisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pembiayaan manajemen bencana, apakah sudah dilakukan sesuai dengan sebagaimana seharusnya pembiayaan dilakukan dalam tiap tahapannya agar potensi wisata yang ada tidak terhambat pengembangannya oleh risiko bencana.

2. KAJIAN TEORI

2.1 KAWASAN WISATA

Wisata adalah kegiatan perjalanan satu atau beberapa orang dengan tujuan mempelajari keunikan daerah tujuan, rekreasi, maupun pengembangan pribadi dalam mengunjungi tempat tertentu dalam jangka waktu sementara (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Pariwisata didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan dari tempat tinggal ke daerah tujuan untuk sementara waktu sebagai usaha menghabiskan waktu senggang, memenuhi rasa ingin tahu, maupun tujuan lainnya selain mencari nafkah. Daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata merupakan wilayah geografis yang dilengkapi oleh daya tarik wisata, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, serta aksesibilitas dan masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Unsur utama dalam produk wisata, yaitu daya tarik wisata, fasilitas pada objek wisata, dan kemudahan mencapai objek wisata (Aliyah et al., 2021). Keberhasilan objek wisata ditentukan oleh atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas yang ada pada kawasan. Samsuridjal & Kaelany (1997) berpendapat bahwa unsur pengembangan objek wisata, antara lain *attraction*, *accessibility*, *amenity*, dan *institution*.

Lebih lanjut, Cooper (2008) berpendapat bahwa komponen atau produk minimal wisata adalah sebagai berikut.

- a. Atraksi
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daya tarik wisata diartikan sebagai semua yang memiliki keindahan, keunikan, dan nilai lebih berupa kekayaan alam, budaya, maupun hasil buatan manusia yang dijadikan sasaran kunjungan bagi wisatawan. Direktorat Jenderal Pemerintahan membagi daya tarik wisata menjadi tiga macam, yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sosial budaya, dan daya tarik wisata minat khusus.
- b. Amenitas
Amenitas atau fasilitas merupakan sarana yang memberikan pelayanan bagi wisatawan selama berwisata, seperti penginapan, restoran, toko souvenir, serta sarana lain yang mendukung akomodasi, kebersihan, dan *hospitality* pada objek wisata.
- c. Aksesibilitas
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, aksesibilitas pariwisata merupakan sarana prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi wisata maupun pergerakan di dalam destinasi wisata. Aksesibilitas kawasan pariwisata meliputi sarana transportasi, prasarana transportasi, dan sistem transportasi.
- d. *Ancillary services* atau organisasi kepariwisataan
Perkembangan kawasan wisata tergantung pada apa yang dimiliki kawasan tersebut untuk ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peran pengelola kawasan wisata (Rusvitasari & Solikhin, 2014).

Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) merupakan kawasan dengan fungsi utama pariwisata atau mempunyai potensi pengembangan pariwisata dan memiliki peran penting dalam satu atau beberapa aspek kehidupan, seperti sosial dan budaya, ekonomi, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Kawasan wisata merupakan kawasan yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dengan luasan tertentu. Kawasan wisata di lereng pegunungan merupakan kawasan strategis dengan kegiatan utama di bidang pariwisata yang terletak pada lereng pegunungan. Kawasan dengan topografi curam dapat menjadi potensi daya tarik wisata karena memiliki pemandangan yang indah dan kesegaran udara serta daya tarik lainnya, seperti keanekaragaman hayati maupun adanya atraksi rekreasi dan olahraga (Aliyah et al., 2021).

2.2 MANAJEMEN BENCANA

Bencana adalah gangguan dalam fungsi masyarakat yang mengakibatkan kerugian baik materi, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam maupun nonalam yang dapat mengancam kehidupan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa maupun dampak psikologis, kerusakan lingkungan, serta kerugian materi. Risiko bencana merupakan potensi kerugian akibat kejadian bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). *Hazard* merupakan kejadian atau kondisi membahayakan yang mengancam kerusakan harta benda, lingkungan, maupun mengakibatkan kehilangan jiwa. Berdasarkan sumber terjadinya, *hazard* diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *natural hazard*, *man-made hazard*, dan *social hazard*. Beberapa jenis *natural hazard* yang sering terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin puting beliung. Upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui beberapa tindakan, antara lain memperkecil ancaman kawasan, meningkatkan kapasitas kawasan, serta mengurangi kerentanan kawasan.

Manajemen bencana diartikan sebagai organisasi yang efektif serta panduan pemanfaatan sumber daya untuk mencegah bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana diartikan sebagai kesatuan proses yang dinamis, berkelanjutan, dan terpadu untuk peningkatan kualitas observasi dan analisis bencana serta yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Manajemen risiko bencana adalah seluruh tahapan perencanaan dan penanggulangan bencana, baik sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Manajemen bencana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, menjamin terlaksananya bantuan untuk korban saat terjadi bencana, serta mencapai pemulihan yang cepat dan efektif.

Ulum (2014) dalam bukunya *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif* mengklasifikasikan tahapan manajemen menjadi tujuh tahapan, yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Manajemen bencana terdiri dari tiga siklus, yakni prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana yang di dalamnya terbagi kembali menjadi beberapa tahapan, yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana terdiri dari tujuh unsur:

- a. Pencegahan
Pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman bencana.
- b. Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan merupakan rangkaian kegiatan antisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah yang tepat dan berdaya guna.
- c. Peringatan Dini
Peringatan dini merupakan rangkaian kegiatan pemberian peringatan kepada masyarakat sesegera mungkin mengenai kemungkinan terjadinya bencana oleh lembaga berwenang.
- d. Mitigasi
Mitigasi merupakan rangkaian upaya pengurangan risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- e. Tanggap Darurat Bencana
Tanggap darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan pada saat kejadian bencana sesegera mungkin untuk menangani dampak buruk yang timbul akibat kejadian bencana tersebut. Tanggap darurat bencana meliputi

- kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan penyelamatan, serta pengkondisian prasarana dan sarana.
- f. Rehabilitasi
Rehabilitasi merupakan pemulihan dan perbaikan aspek pelayanan publik agar memadai wilayah pascabencana.
 - g. Rekonstruksi
Rekonstruksi merupakan pembangunan kembali sarana prasarana dan kelembagaan agar kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang.

Kesadaran akan peran pariwisata dalam menunjang ekonomi kawasan dan memenuhi kebutuhan psikologis masyarakat menjadi dasar perlunya upaya manajemen bencana agar dapat memperkecil risiko bencana dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana pada kawasan wisata yang memang berada di kawasan bahaya alam (Rosyidie, 2004). Kajian akan karakteristik kebencanaan dan kawasan wisata menjadi dasar perumusan upaya pengelolaan mitigasi bencana pada kawasan wisata yang ada. Kewaspadaan akan risiko bencana menjadi penting agar upaya evakuasi dan tanggap darurat telah siap dilakukan saat bencana terjadi.

2.3 PEMBIAYAAN MANAJEMEN BENCANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam manajemen bencana salah satunya dengan pengalokasian anggaran manajemen bencana dalam APBN maupun dalam bentuk dana siap pakai. Dana manajemen bencana diartikan sebagai dana yang digunakan untuk manajemen bencana baik pada tahap prabencana, tanggap darurat, maupun saat pascabencana (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Strategi keuangan untuk manajemen bencana dimaksudkan untuk memastikan bahwa individu, bisnis, dan pemerintah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengelola konsekuensi keuangan dan ekonomi yang merugikan dari bencana sehingga memungkinkan pembiayaan kritis untuk tanggap bencana, pemulihan, dan rekonstruksi (Pojani et al., 2017). Dalam manajemen bencana, *budgeting* atau penganggaran menjadi hal penting karena penganggaran akan menentukan sukses dan efektifnya proses pelaksanaan manajemen yang ada (Adiyoso & Kusumaningtyas, 2018).

Berdasarkan sumbernya, pembiayaan bencana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pemerintah dan nonpemerintah. Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah teralokasikan pada tiga jenis pembiayaan, yaitu APBN untuk bencana berskala nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk bencana berskala provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota untuk bencana berskala kabupaten/kota. Dalam praktiknya, apabila APBD Kabupaten/Kota belum cukup untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan yang ada, maka Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat meminta bantuan pada provinsi maupun nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana penanggulangan bencana. Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari nonpemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor, swadaya masyarakat, swasta, maupun bantuan luar negeri dapat dialokasikan melalui bantuan langsung pada lokasi atau sektor prioritas masyarakat.

Berdasarkan pemanfaatan dari tahapan manajemen bencana menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bentuk pembiayaan manajemen bencana di Indonesia, meliputi dana daftar isian pelaksana anggaran, dana kontijensi, dana *on call*, dana bantuan sosial berpola hibah, dana yang bersumber dari masyarakat, dan dana dukungan komunitas internasional. Struktur pembiayaan diartikan sebagai upaya pengaturan pembiayaan agar tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan sesuai serta sebagai upaya meminimalisasi risiko yang muncul akibat adanya pembiayaan yang dilakukan. Struktur pembiayaan akan menunjukkan seberapa besar komposisi pembiayaan yang ada. Komponen pada struktur pembiayaan meliputi bentuk pembiayaan dan nominal modal yang digunakan (Putri & Wisudanto, 2016). Belanja bencana dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu belanja prabencana, belanja tanggap darurat, dan belanja pascabencana. Pengeluaran prabencana terkait dengan program mitigasi dan kesiapsiagaan, misalnya brosur informasi bencana dan kursus kesiapsiagaan bencana di sekolah. Pengeluaran tanggap darurat dapat didefinisikan sebagai setiap biaya yang dikeluarkan untuk membantu korban pada saat bencana terjadi. Pengeluaran pascabencana adalah pengeluaran yang terkait dengan proses pemulihan.

Manajemen bencana terus mengalami perubahan paradigma dari waktu ke waktu. Konsep manajemen yang awalnya bersifat paradigma konvensional, yaitu paradigma yang berfokus pada upaya pascabencana, mulai bergeser ke arah paradigma mitigasi yang mulai membahas mengenai bagaimana cara memperkecil kemungkinan bencana itu terjadi

(Wibowo, 2018). Struktur pembiayaan yang merupakan komposisi pembiayaan dalam tiap tahapan manajemen bencana akan menunjukkan apakah pergeseran tersebut terjadi di kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian struktur pembiayaan manajemen bencana kawasan wisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan pencarian dan sintesis kajian literatur (teori) terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan verifikasi teori yang ada dengan hasil penelitian yang ditemukan mengenai fenomena yang diteliti, yaitu pembiayaan program mitigasi bencana. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah kawasan wisata lereng Gunung Lawu yang berada di Kabupaten Karanganyar, secara khusus yang berada di Kecamatan Jenawi, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, dan Kecamatan Ngargoyoso. Batasan substansi amatan terkait pembiayaan program, yaitu pembiayaan program yang eksplisit diperuntukkan untuk kawasan wisata, sedangkan untuk program yang sifatnya umum seluruh kabupaten tidak menjadi bagian amatan. Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah lima tahun terakhir, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2022. Cakupan data tersebut diharapkan dapat mewakili kondisi kawasan saat tidak terjadi pandemi (2018-2019) dan saat terjadi pandemi (2020-2022).

Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh objek wisata yang berada di lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar. Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *quota sampling* berdasarkan risiko bencana dan jumlah kunjungan objek wisata. Sampel yang digunakan merupakan 30 objek wisata dari 52 objek wisata yang berada di kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar. Titik lokasi wisata dipilih berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan selama lima tahun terakhir dan tingkat risiko bencana yang ada. Data wisatawan lima tahun terakhir dipilih berdasarkan asumsi bahwa data tersebut mampu merepresentasikan kondisi pengunjung objek wisata pada masa tidak ada pandemi (2018-2019) dan masa pandemi (2020-2021). Populasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko bencana, baru kemudian dipilih objek wisata dengan rata-rata jumlah wisatawan tertinggi sehingga sampel yang terpilih dapat mewakili seluruh risiko bencana.

Perolehan data primer dilakukan dengan observasi objek wisata dan wawancara mendalam terhadap pengelola objek wisata yang menjadi sampel penelitian maupun lembaga atau dinas terkait. Data sekunder didapatkan melalui survei ke lembaga terkait, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Karanganyar, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, serta eksplorasi studi literatur penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta publikasi dinas terkait wisata maupun kebencanaan Kabupaten Karanganyar. Teknik analisis yang digunakan, yakni teknik analisis deskriptif kuantitatif persentase untuk mengetahui struktur pembiayaan manajemen bencana yang ada didasarkan pada tahapan manajemen bencana, yaitu pencegahan, peringatan dini, kesiapsiagaan, mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 KAWASAN WISATA

Secara astronomis, Kabupaten Karanganyar terletak pada $110^{\circ} 40'' - 110^{\circ} 70''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 28'' - 7^{\circ} 46''$ Lintang Selatan dengan total wilayah seluas $773,79 \text{ km}^2$ dengan 78 objek wisata tersebar di seluruh kecamatan dengan beragam jenis wisata, yaitu wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata agro, dan lainnya. Kawasan penelitian berada pada Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, dan Kecamatan Jatiyoso di lereng Gunung Lawu dan merupakan pusat pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Karanganyar.

Secara administratif, batas-batas kawasan penelitian adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan
- Sebelah Barat : Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jumapolo, dan Kecamatan Jatipuro.

Objek wisata yang berada di kawasan penelitian memiliki berbagai atraksi, baik atraksi alam maupun buatan, antara lain *river tubing*, *camping ground*, *miniatur dunia*, *hiking*, *archery*, *outbound*, *3D House*, *hobbit house*, *green house*, kebun buah, kereta wisata, air terjun, persewaan jeep/ATV, *flying fox*, *cottage*, dan wahana lain bergantung pada jenis wisata

dan tema pengembangan wisata. Rata-rata objek wisata merupakan milik swasta/pribadi yang menggunakan hak guna lahan milik Perusahaan Umum Perhutanan Negara (Perum Perhutani) maupun milik Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro dan telah beroperasi dari tahun 1969 dan didominasi oleh objek wisata yang baru beroperasi selama 10 tahun terakhir. Objek wisata pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar dapat ditempuh melalui jalan utama Karanganyar-Magetan yang berjarak antara 19 km hingga 33 km dari pusat Kabupaten Karanganyar. Gambar 2. merupakan grafik yang menunjukkan jumlah kunjungan berdasarkan jenis objek wisata pada kawasan wisata Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.

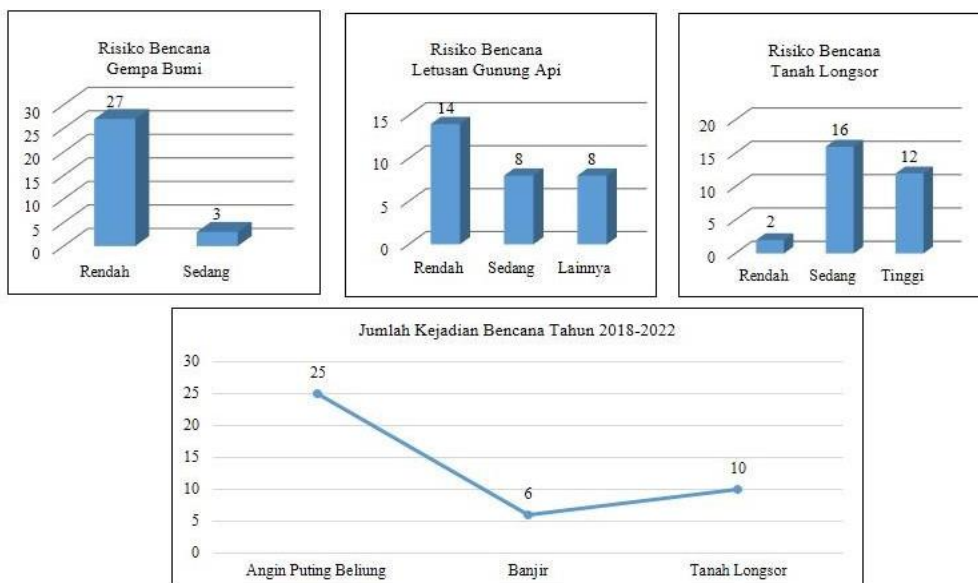


Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar (2022)

Gambar 2. Grafik Jumlah Kunjungan Objek Wisata Lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

4.2 MANAJEMEN BENCANA

Berdasarkan Peta Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar yang dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Karanganyar, kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar berada di kawasan risiko bencana longsor, baik risiko longsor tinggi, menengah, maupun rendah. Namun pada kenyataannya, selain tanah longsor objek wisata juga memiliki risiko bencana alam lain, seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Gambar 3. merupakan grafik dan Gambar 4. merupakan dokumentasi yang menunjukkan risiko bencana maupun kejadian bencana 5 tahun terakhir pada objek wisata di kawasan penelitian.



Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar, Aplikasi InaRisk Personal, dan Pengelola Wisata (2022)

Gambar 3. Grafik Risiko dan Kejadian Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar



Sumber: Pengelola Wisata (2022)

Gambar 4. Dokumentasi Kejadian Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar

Kejadian bencana pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar berdampak pada rusaknya fasilitas-fasilitas objek wisata, seperti toilet, kantin, *cottage*, pagar pembatas kawasan, taman, jembatan, gazebo, pos pendakian, jalan atau jalur wisatawan, *rest area*, bahkan berdampak pada kendaraan pengunjung yang sedang parkir. Angin puting beliung yang terjadi umumnya menyebabkan pohon tumbang karena dibarengi oleh intensitas hujan yang deras. Selain karena risiko bencana yang telah diidentifikasi, kejadian bencana terjadi akibat beberapa hal, antara lain kelalaian pengelola wisata dalam menjaga kebersihan sehingga saluran air tersumbat dan menyebabkan banjir, penggundulan hutan yang menyebabkan banjir maupun tanah longsor, serta posisi objek wisata yang berada di cekungan jalur sungai sehingga memiliki potensi banjir tinggi apabila intensitas hujan naik.

Kesadaran akan peran pariwisata dalam menunjang ekonomi kawasan dan memenuhi kebutuhan psikologis masyarakat menjadi dasar perlunya upaya manajemen bencana agar dapat memperkecil risiko bencana dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana pada kawasan wisata yang memang berada di kawasan bahaya alam (Rosyidie, 2004). Program manajemen bencana yang dilakukan pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar merespon kejadian-kejadian bencana alam yang telah terjadi dalam lima tahun terakhir. Program manajemen bencana ini dilakukan oleh pengelola wisata swasta, BPCB Jawa Tengah, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Daerah setempat, maupun BPBD Kabupaten Karanganyar.

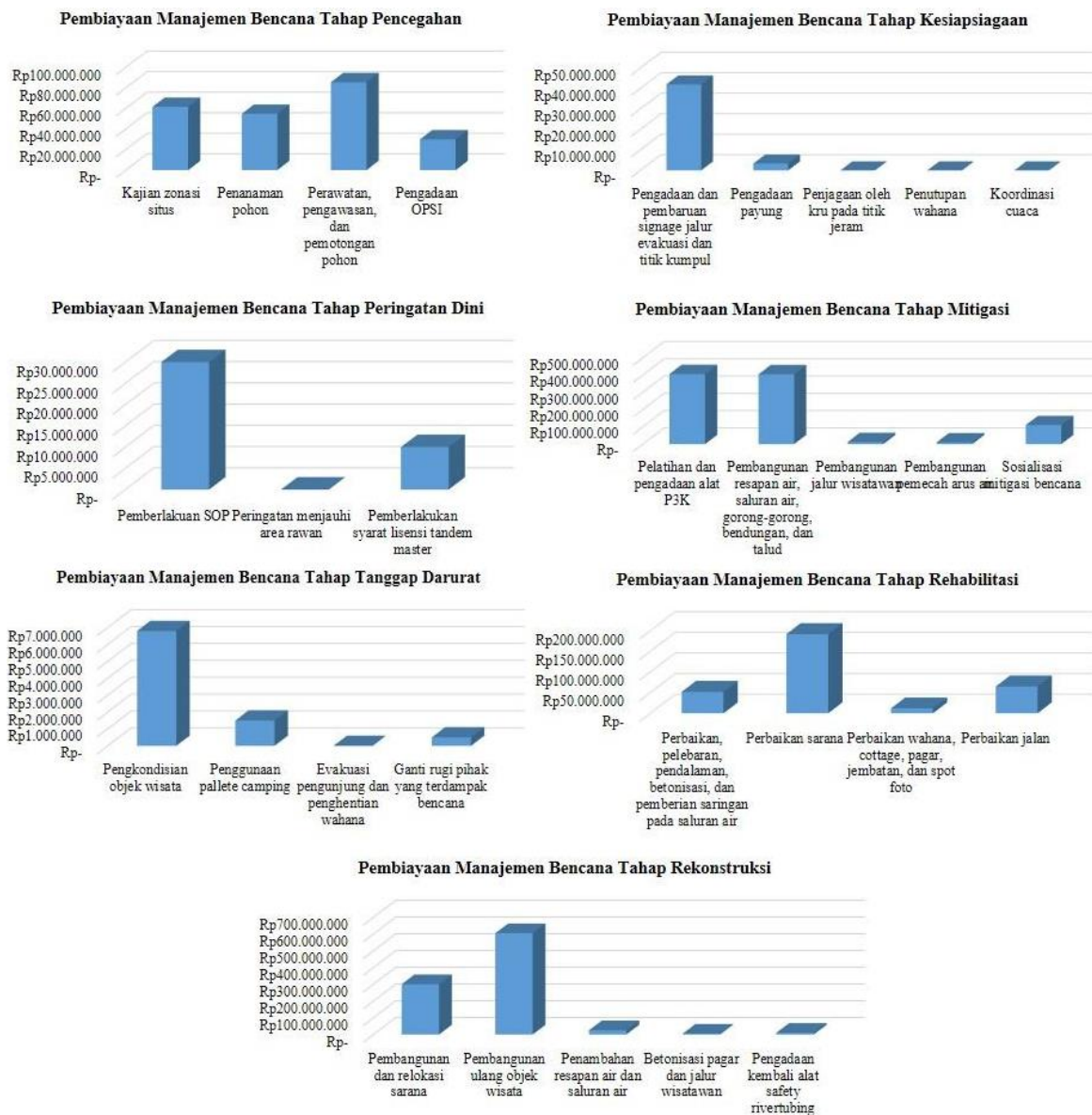
Program manajemen bencana kawasan wisata Lereng Gunung Lawu dijabarkan sebagai berikut dan dapat dilihat pula pada Gambar 5.

a. Pencegahan

Program pencegahan yang telah dilakukan di kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar antara lain pembuatan rencana zonasi pemanfaatan ruang, identifikasi dan pengenalan sumber ancaman bencana alam yang berada didalam objek wisata, serta kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dapat mengakibatkan atau meningkatkan ancaman bencana, seperti pemantauan terhadap pohon, tebing, sungai, air terjun, atau sumber ancaman bencana lainnya yang berada di objek wisata maupun sekitar objek wisata. Perawatan, pengawasan, dan pemotongan pohon pada beberapa objek wisata dilakukan sesuai mekanisme perijinan Perhutani, LMDH, dan BPCB Jawa Tengah selaku pemilik lahan maupun pengelola wisata. Selain itu pada objek wisata pendakian, dilakukan operasi bersih sampah serta perawatan jalur pendakian yang juga didasarkan pada laporan pendaki. Dalam melakukan manajemen bencana tahap pencegahan selama lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 231.819.000,00.

b. Kesiapsiagaan

Program kesiapsiagaan yang telah dilakukan di kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar, antara lain kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan gladi mekanisme tanggap darurat yang dilakukan oleh internal pengelola wisata maupun BPBD Kabupaten Karanganyar. Pengelola wisata melakukan penyiapan lokasi evakuasi meskipun pada beberapa objek wisata belum didukung dengan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. Dalam upaya kesiapsiagaan, pengelola wisata juga melakukan penjagaan oleh karyawan/kru pada titik-titik bahaya, pembentukan tim khusus untukantisipasi kejadian bencana, serta melakukan koordinasi cuaca khususnya pada objek wisata air terjun atau *river tubing*. Dalam melakukan manajemen bencana tahap kesiapsiagaan selama lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 45.370.400,00.



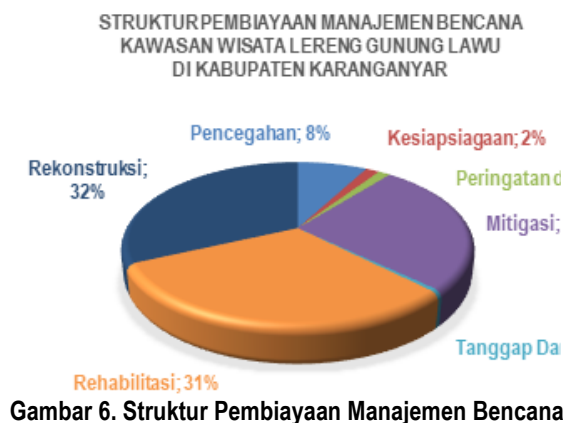
Gambar 5. Pembiayaan Manajemen Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar

- c. Peringatan Dini
Peringatan dini yang dilakukan pada kawasan wisata Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar difokuskan pada upaya penjagaan kru pada area-area bahaya untuk mengamati gejala bencana, peringatan petugas penjaga atau pengelola kepada pengunjung yang melanggar batas aman, serta penegasan SOP khususnya pada objek wisata adrenalin, seperti pemberlakuan syarat lisensi *tandem master* untuk petugas tandem. Dalam melakukan manajemen bencana tahap peringatan dini selama lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 40.000.000,00.
- d. Mitigasi
Mitigasi yang dilakukan pada kawasan wisata Lereng Gunung Lawu berfokus pada upaya pengurangan risiko bencana, khususnya pada objek wisata. Pada tahap ini program difokuskan pada pembangunan dan perawatan infrastruktur, seperti resapan air, saluran air, gorong-gorong, bendungan, dan talud, pengadaan alat mitigasi, serta kegiatan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pelaku wisata) dalam melakukan mitigasi bencana maupun terhadap warga sekitar yang juga terdampak kejadian bencana. Pengadaan alat mitigasi yang dilakukan, antara lain peralatan P3K, alat pemadam api ringan atau APAR, *camera trap*, CCTV, gergaji, payung, serta alat lainnya yang mendukung pengurangan risiko bencana. Dalam melakukan manajemen bencana tahap mitigasi lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 783.696.202,00.

- e. **Tanggap Darurat**
 Pada tahap tanggap darurat, program yang dilakukan pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar difokuskan pada evakuasi pengunjung ke tempat aman, seperti titik kumpul, aula, dan gazebo, juga pada pemberian jaminan asuransi, upaya koordinasi, penghentian wahana, ganti rugi pihak yang terdampak langsung oleh kejadian bencana, serta pengkondisian kembali objek wisata dengan cara pemberlakuan buka-tutup bendungan air serta pembersihan pohon, longsor tanah, ataupun material lain yang mengganggu kenyamanan wisatawan hingga penutupan sementara objek wisata. Dalam melakukan manajemen bencana tahap tanggap darurat selama lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 13.300.000,00.
- f. **Rehabilitasi**
 Rehabilitasi yang dilakukan pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar merupakan upaya pemulihan dan perbaikan sarana prasarana yang terdampak kejadian bencana. Perbaikan dilakukan antara lain terhadap jalan, saluran air, pos pendakian, aula, warung, taman, kantin, dapur, toko suvenir, toilet, kolam renang, *rest area*, wahana, *cottage*, pagar, jembatan, dan spot foto. Dalam manajemen bencana tahap rehabilitasi selama lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 905.955.614,00.
- g. **Rekonstruksi**
 Pada tahap rekonstruksi, pembiayaan program difokuskan pada penambahan infrastruktur, seperti jalan, resapan air, sarana penunjang seperti rumah makan dan fasilitas lainnya yang rusak akibat kejadian bencana, serta pembangunan ulang wahana maupun spot foto wisata. Penambahan infrastruktur dilakukan apabila infrastruktur yang ada belum mampu mengurangi risiko bencana, sedangkan pembangunan ulang infrastruktur dilakukan apabila infrastruktur yang ada rusak total akibat kejadian bencana. Program rekonstruksi berkaitan dengan keberlanjutan objek wisata karena apabila infrastruktur yang rusak total tidak segera dibangun ulang, maka unsur-unsur wisata terganggu dan kenyamanan pengunjung berkurang. Total pembiayaan yang dilakukan dalam tahap ini selama lima tahun terakhir yaitu Rp 945.000.000,00.

4.3 STRUKTUR PEMBIAYAAN MANAJEMEN BENCANA

Struktur pembiayaan program manajemen bencana menggambarkan komposisi pembiayaan program manajemen bencana berdasarkan tahapan program manajemen bencana. Analisis struktur pembiayaan dilakukan sebagai upaya meminimalisasi risiko yang muncul akibat adanya pembiayaan yang dilakukan (lihat Tabel 1). Struktur pembiayaan akan menunjukkan seberapa besar komposisi pembiayaan yang ada sehingga dapat dilihat apakah tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan telah sesuai. Berdasarkan tahapan program manajemen bencana, secara keseluruhan pada kawasan wisata di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar, sebesar 32% pembiayaan dilakukan pada tahap rekonstruksi, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6 dan Tabel 1.



Struktur pembiayaan manajemen bencana kawasan wisata di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar paling tinggi terdapat pada pembiayaan pascabencana tahap rekonstruksi dengan persentase 32% atau senilai dengan Rp 945.000.000,00 serta tahap rehabilitasi dengan persentase 31% atau senilai dengan Rp 905.955.614,00. Kondisi ini terjadi karena manajemen bencana yang dilakukan merupakan upaya perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana maupun pengadaan alat yang rusak akibat kejadian bencana. Pembiayaan pada tahap mitigasi memiliki angka terbesar ketiga, yaitu 26% atau senilai dengan Rp 783.696.202,00 yang artinya pengelola wisata telah sadar akan risiko bencana pada objek wisata yang dikelola sehingga mengalokasikan dana yang cukup tinggi untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana tersebut. Angka 0% pada tahap tanggap darurat terjadi karena upaya atau program yang dilakukan pada saat

tanggap darurat bencana difokuskan pada upaya koordinasi dan pengkondisian objek wisata yang dilakukan oleh pengelola wisata (karyawan) sehingga tidak memerlukan pembiayaan yang besar.

Tabel 1. Analisis Struktur Pembiayaan Manajemen Bencana

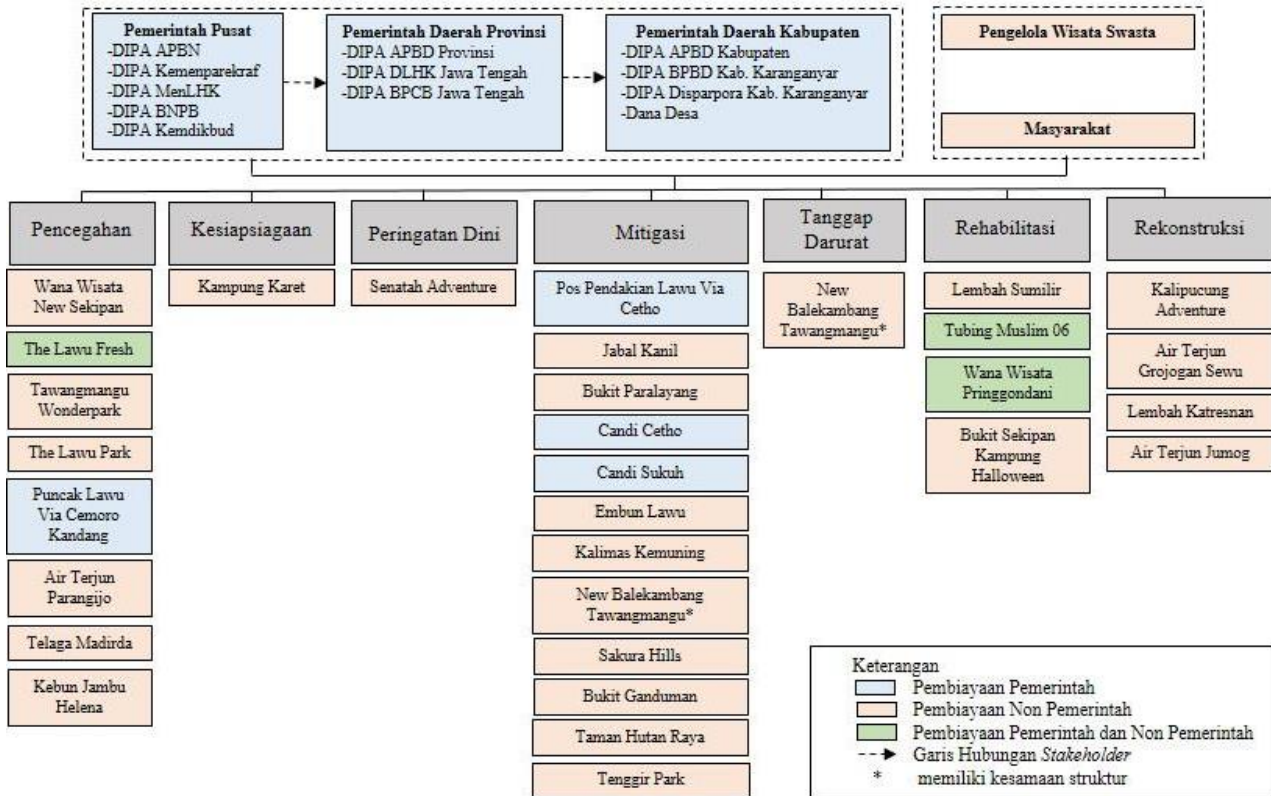
No	Nama Obyek Wisata	Pencegahan	Kesiapsiagaan	Peringatan Dini	Mitigasi	Tanggap Darurat	Rehabilitasi	Rekonstruksi
1	Jabal Kanil	0%	0%	0%	91%	1%	9%	0%
2	Bukit Paralayang	0%	0%	31%	62%	1%	6%	0%
3	Bukit Sekipan Kampung Halloween	0%	0%	0%	2%	0%	98%	0%
4	Candi Cetho	5%	3%	0%	92%	0%	0%	0%
5	Air Terjun Jumog	1%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
6	Wana Wisata New Sekipan	39%	10%	0%	35%	6%	10%	0%
7	New Balekambang Tawangmangu	26%	0%	0%	37%	37%	0%	0%
8	Kali Pucung Adventure	0%	0%	5%	0%	0%	0%	95%
9	Candi Sukuh	23%	2%	0%	48%	0%	27%	0%
10	Taman Hutan Raya	0%	20%	0%	80%	0%	0%	0%
11	Tenggir Park	76%	10%	0%	10%	0%	5%	0%
12	Bukit Ganduman	0%	0%	0%	66%	1%	33%	0%
13	Telaga Madirda	87%	0%	0%	0%	13%	0%	0%
14	Lembah Katresnan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
15	Pos Pendakian Lawu Via Cetho	0%	0%	0%	71%	2%	27%	0%
16	Lembah Sumilir	0%	8%	0%	0%	7%	85%	0%
17	Kalimas Kemuning	0%	0%	0%	89%	5%	6%	0%
18	Kebun Jambu Hellena	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	Air Terjun Grojogan Sewu	2%	0%	0%	4%	0%	8%	85%
20	The Lawu Park	64%	1%	0%	0%	0%	0%	35%
21	Sakura Hills	45%	5%	0%	50%	0%	0%	0%
22	Kampung Karet	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
23	Senatah Adventure	0%	0%	95%	5%	0%	0%	0%
24	Air Terjun Parang Ijo	98%	0%	0%	0%	2%	0%	0%
25	Tawangmangu Wonder Park	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26	Tubing Muslim 06	8%	1%	12%	7%	1%	59%	12%
27	Embun Lawu	22%	5%	0%	73%	0%	0%	0%
28	Wana Wisata Pringgodani	0%	0%	0%	31%	0%	68%	0%
29	Puncak Lawu Via Cemoro Kandang	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
30	The Lawu Fresh	0%	0%	0%	99%	0%	1%	0%
Total		8%	2%	1%	26%	0%	31%	32%

Pembiayaan manajemen bencana, khususnya pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, linier dengan kejadian bencana yang terjadi. Objek wisata dengan intensitas kejadian bencana tinggi memiliki kebutuhan pembiayaan manajemen bencana yang lebih banyak. Di sisi lain, objek wisata yang tidak terdapat kejadian bencana dalam ruang lingkup waktu penelitian, memiliki kebutuhan pembiayaan manajemen bencana yang lebih sedikit. Selain intensitas bencana, jumlah kunjungan wisata juga linier terhadap kebutuhan pembiayaan manajemen bencana. Jumlah kunjungan berpengaruh pada pengembangan kawasan yang juga berhubungan dengan pelaksanaan program manajemen bencana pada objek wisata tersebut dikarenakan pembiayaan yang dilakukan oleh pengelola wisata bersumber dari penerimaan pendapatan objek wisata.

Struktur pembiayaan manajemen bencana dapat dilihat pada Gambar 7. Dapat diketahui bahwa pembiayaan manajemen bencana kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar bersumber dari pembiayaan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten, serta pembiayaan nonpemerintah dari pengelola wisata swasta dan masyarakat. Apabila ditinjau dari masing masing objek wisata, terdapat objek wisata yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan pemerintah saja, pembiayaan nonpemerintah saja, maupun keduanya.

Dalam kasus Indonesia, lebih dari separuh Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran mitigasi yang lebih rendah dibandingkan dengan standar internasional. Porsi anggaran dari badan penanggulangan bencana terbatas pada tahap

prabencana. BNPB mengklasifikasi tahapan-tahapan manajemen bencana dalam tiga fase, yakni prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Menurut Pojani et al. (2017), strategi keuangan dalam manajemen bencana dilakukan untuk memastikan ketersediaan pembiayaan untuk tanggap bencana, pemulihan, dan rekonstruksi. Pernyataan-pernyataan tersebut senada menyatakan bahwa pembiayaan manajemen bencana selama ini diprioritaskan alokasinya untuk tanggap darurat dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Di sisi lain, pembiayaan untuk upaya prabencana (pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi) masih minim.



Gambar 7. Bagan Struktur Pembiayaan Manajemen Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu

Pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu, pernyataan-pernyataan diatas sesuai dengan kondisi dimana 63% total pembiayaan manajemen bencana dilakukan pada tahap pascabencana, yaitu 31% untuk tahap rehabilitasi dan 32% untuk tahap rekonstruksi. Meskipun demikian, alokasi pembiayaan pada fase prabencana juga cukup besar, yakni 37% dengan tahap mitigasi memiliki alokasi pembiayaan 26%. Namun, apabila ditinjau dari struktur masing-masing objek wisata, 73% objek wisata memiliki dominasi alokasi pada fase prabencana baik pada tahap pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, maupun mitigasi. Kondisi ini sesuai dengan perubahan paradigma manajemen bencana menjadi paradigma mitigasi, yaitu perluasan kegiatan manajemen bencana pada tahap prabencana atau pengurangan risiko bencana.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian struktur pembiayaan manajemen bencana kawasan wisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, diketahui bahwa kawasan penelitian memiliki potensi wisata, baik wisata agro, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, maupun wisata minat khusus. Kawasan wisata telah dilengkapi oleh unsur-unsur pengembangan objek wisata, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan *ancillary services* atau organisasi pengelola. Kawasan juga memiliki risiko bencana alam longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api, baik tingkat rendah, sedang, maupun tinggi, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi 41 kejadian bencana yang meliputi angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Berkaitan dengan potensi wisata dan risiko bencana, kawasan wisata telah melakukan program manajemen bencana pada seluruh tahap, yaitu pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pembiayaan manajemen bencana bersumber dari pembiayaan pemerintah dan pembiayaan nonpemerintah dalam bentuk dana daftar isian pelaksana anggaran dan dana yang bersumber dari masyarakat. Pembiayaan pemerintah bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sementara pembiayaan nonpemerintah bersumber dari pengelola wisata dan masyarakat. Sumber pembiayaan manajemen bencana linier dengan pengelola wisata. Struktur pembiayaan manajemen bencana merupakan yang paling

tinggi, yaitu 32% untuk tahap rekonstruksi, artinya pembiayaan manajemen bencana masih difokuskan untuk tahap pascabencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W., & Kusumningtyas, R. A. (2018). *Manajemen Bencana: Pengantar & Isu-Isu Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aliyah, I., Sugiarti, R., & Yudana, G. (2021). *Manajemen Risiko Bencana Kawasan Wisata Lereng Pegunungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar)*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Diakses dari: <https://kitamenulis.id/2021/11/17/manajemen-risiko-bencana-kawasan-wisata-lereng-pegunungan-berbasis-pemberdayaan-masyarakat-kawasan-wisata-lereng-gunung-lawu-kabupaten-karanganyar/>
- Antara. (2020, 14 Januari). *Pariwisata Kabupaten Karanganyar Tetap Jadi Unggulan*. Diakses pada 4 Maret 2023 dari <https://jateng.antaranews.com/berita/285700/pariwisata-kabupaten-karanganyar-tetap-jadi-unggulan>
- Cooper, C. (2008). *Tourism: Principles and Practice*. Edinburgh: Prentice Hall Financial Times.
- Cró, S. & Martins, A. M. (2017). Structural breaks in international tourism demand: Are they caused by crises or disasters? *Tourism Management* 63 (December 2017), 3-9. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.009>
- Fadafan, F. K., Danehkar, A., & Pourebrahim, S. (2018). Developing a Non-Compensatory Approach to Identify Suitable Zones for Intensive Tourism in an Environmentally Sensitive Landscape. *Ecological Indicators*, 87, 152–166. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.11.066>
- Paidi. (2012). Pengelolaan Manajemen Risiko Bencana Alam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 29(321), 37–46. Diakses dari: <https://www.neliti.com/publications/218658/pengelolaan-manajemen-risiko-bencana-alam-di-indonesia>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_10.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4833>
- Pojani, E., Grabova, P., & Ciric, D. (2017). Financing Means for Disaster Risk Management - The Case of Albania. In *1st International Symposium Knowledge For Resilient Society K-FORCE*. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/319956302_Financing_Means_for_Disaster_Risk_Management_-_The_Case_of_Albania
- Putri, E. S., & Wisudanto. (2016). Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi. In *Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia*. Diakses dari: <https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/download/3136/2409>
- Rivani, E. (2017). Mekanisme, Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana di Daerah. *Jurnal DPR*, 1(22), 59–70. <https://doi.org/10.22212/kajian.v22i1.1498>
- Rosyidie, A. (2004). Aspek Kebencanaan pada Kawasan Wisata. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 15(2), 48–64. Diakses dari: <https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/download/4285/2325/14686>
- Rusvitasari, E., & Sholikhin, A. (2014). Strategi Pengembangan Wisata Alam Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata Umbul Sidomukti Bandungan Semarang. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 10(1), 1-24.
- Samsuridjal D., & Kaelany, H. D. (1997). *Peluang di Bidang Pariwisata*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Ulum, C. (2014). *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*. Malang: UB Press.
- UNWTO. (2021). UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex. *UNWTO World Tour. Barom.* 19, 1-42. Diakses dari: <https://www.e-unwto.org/loi/wtobarometereng>
- Wibowo, M. (2018). Strategi Mitigasi untuk Mengatasi Penyakit Akibat Sanitasi Lingkungan yang Buruk: Paradigma Baru Mitigasi Bencana. *Journal of Environmental Engineering*, 6(3), 207–315. <https://doi.org/doi.org/10.29122/jrl.v6i3.1934>